

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BPD di desa aketobatu belum berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan fungsi pengawasan BPD. Hal ini membuat pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kebijakan kepala desa menjadi terhambat sehingga dibutuhkan perhatian dan pembinaan yang serius untuk meningkatkan Fungsi pengawasan BPD di desa Aketobatu agar sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU dan PP tentang Desa.
2. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan BPD terhadap kebijakan kepala desa di desa aketobatu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD yaitu, yang pertama faktor pendidikan, dimana tingkat pendidikan yang saangat rendah sehingga pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang minim kemudian tidak ditunjang dengan sarana dan prasana yang memadai. Kemudian yang kedua faktor ekonomi dimana anggota BPD tidak mendapat tunjangan yang sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **5.2. Saran**

Mengacu pada kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi saran dari penulis untuk mengefektifkan fungsi pengawasan BPD di desa aketobatu (Noramake) bahwa untuk meningkatkan kinerja BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepala desa, maka diperlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah kota maupun provinsi dan kecamatan. Dukungan tersebut berupa pemberian tunjangan bagi anggota BPD dan pengalokasian dana operasional untuk mendukung program kerja BPD.

Selain itu juga pemerintah harus melakukan pembinaan secara intens terkait tugas dan fungsi BPD, agar BPD di desa Aketobatu betul-betul memahami tugas dan fungsi dari BPD itu sendiri. Kemudian juga harus ada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kepala desa di desa aketobatu.

## Daftar Pustaka

- Makmur, 2001. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Mustafa, Delly. 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Widjaja, Haw. 2012. *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh)*. Jakarta: PT. Rajagraindo Persada.
- Maleong, Lexy. 2004. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Ruslan. 2009. *Pelaksanaan Fungsi Wewenang Pengawasan Badan Permusyarawatan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Akedotilou (Paceda) Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*. Jurusan Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Saputra, Prayoza. 2014. *Optimalisasi Peran Badan Permusyarawatan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Tridayaksakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi*. Skripsi. Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Wahyuni, Sri. 2004. *Demokrasi Pemerintahan Desa (Studi Analisis Demokratisasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan)*.  
<http://core.uk/download/files/379/11714896.pdf>. Diakses pada tanggal 12 januari 2016 jam 20.00
- Kiswan, 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Di Desa Fatufia Kecamatan Bohodopi Kabupaten Morowali*.  
<https://kiswan88.files.wordpress.com/2013/10/skripsiku.pdf>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2016 jam 20.00
- Masuara, Rico. 2008. *Pelaksanaan Badan permusyarawatan desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*.  
[Ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/55375066](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/55375066). Diakses pada tanggal 19 Januari 2016 jam 20.00

Septiani, Cintia. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan (Studi Kasus Di Perpustakaan RSUP Fatmawati)*

<https://Septiani.files.wordpress.com/2008/10/skripsiku.pdf>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2016 jam 20.00

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014. <http://otonomidaerah.com> diakses 19 januari 2016 jam 10.00

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Sinar Grafindo

